

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak terkena kolonialisme Barat. Dikenal sebagai negara Gajah Putih, Thailand memiliki luas 510.000 kilometer atau hampir sama dengan ukuran negara Perancis. Sebagian besar atau mayoritas penduduknya adalah orang Thai-Buddha, sisanya adalah orang-orang minoritas seperti Cina, India, dan Melayu. Karena mayoritas penduduknya beragama Budha, hanya sedikit yang beragama Islam. Wilayah Thailand Selatan khususnya tiga provinsi yaitu Patani, Narathiwat, dan Yala dalam sensus menetapkan populasi Muslim Melayu di tiga provinsi Selatan penduduk adalah 1.673.900 jiwa, memiliki perbedaan besar secara sosial budaya jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah Thailand yang lain. (Nuereng, 2016). Permasalahan mengenai integrasi merupakan tantangan bagi negara-negara yang menganut demokrasi termasuk negara Thailand. Naiknya jumlah kekerasan terhadap kelompok minoritas terutama karena agama dan keyakinan yang berbeda membahayakan integrasi bangsa. Demokrasi nampaknya masih menyisakan masalah terkait perwujudan keadilan bagi minoritas. Sebagian kalangan memandang demokrasi sebagai model yang tegak di atas hegemoni pihak mayoritas dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Tuntutan terhadap keadilan seperti ini lebih jauh menyebabkan lahirnya gerakan yang menuntut keadilan, baik yang bersifat lunak maupun keras dan bahkan memilih untuk memisahkan diri (Helmiati, 2014).

Negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada didalamnya. Integrasi mempunyai arti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseraian dan keselarasan secara nasional (Agus, Integrasi

Nasional sebagai Salah Satu Parameter Pesatuan dan Kesatuan Bangsa Republik Indonesia, 2016). Integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kestauan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama suatu bangsa.

Integrasi merupakan harapan bagi setiap negara. Ketika suatu negara memiliki konflik atau pertentangan, maka akan banyak kerugian yang dialami baik berupa fisik materiil maupun kerugian mental seperti rasa khawatir, bahkan ketakutan yang berkepanjangan. Negara yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan negara. Setiap negara, masyarakatnya disamping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik maupun pertentangan. Persamaan kepentingan, consensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan yang ada dalam masyarakat bernegara seperti suku, agama, budaya, kepentingan akan menyimpan potensi konflik, terlebih jika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan cara yang tepat.

Thailand merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut ajaran agama Buddha, namun tidak hanya penganut agama Buddha, ada minoritas kecil pemeluk Islam di sebuah provinsi bernama Patani. Patani adalah salah satu provinsi yang berada di Thailand, terletak di bagian Selatan dan berpenduduk dengan mayoritas Muslim Melayu. Patani pada awalnya merupakan kerajaan Islam yang merdeka. Kerajaan Patanisejak akhir abad 18 merupakan taklukan Kerajaan Siam, tetapi Patani tetaplah otonomi. Kemudian pada tahun 1902, Kerajaan Patani mulai menjadi bagian dari integral dari Kerajaan Siam. Sejak saat itulah otonomi budaya dan masyarakat Melayu di Patani mulai terancam. Karena, Kerajaan Siam Chulalongkorn mulai melakukan program pembaruan di bawah sistem *Thesaphiban* (sistem perubahan Negara Patani

yang otonomi menjadi provinsi di bawah kekuasaan langsung dari pemerintahan pusat), yang bertujuan untuk menghapuskan identitas dan agama orang Melayu Patani. Maka sebab itulah menimbulkan rasa ketidakpuasan hati bagi masyarakat Patani, dan bangkit menentang atau memberontakan terhadap Kerajaan Siam (Jehma, Sumardi, & Sugiyanto, 2017).

Persoalan tentang sejarah Patani, tidak terlepas dari persoalan Tanah Melayu. Tanah Melayu sendiri merupakan suatu semenanjung yang terbentang di belahan tenggara benua Asia dan merupakan kawasan yang luas. Tanah Melayu sendiri berada di Utara mulai dari Segenting Kra hingga ujungnya serta pulau Singapura di bagian selatan. Orang Melayu ialah salah satu dari bangsa dalam keluarga rumpun bangsa yang sangat luas yang dikenal sebagai MelayuPolinesia ataupun Austronesia. Antara suku-suku bangsa dalam rumpun ini ialah Melayu, Jawa, Bugis, Sunda, Maori, Hawaii, Fiji, dan sebagainya (Thamrin, 2018). Dengan begitu, Tanah Melayu mempunyai dua bagian yaitu di bagian utara dimulai dari Segenting Kra, Setul, Yala, dan Bangnara. Kemudian di bagian selatan dimulai dari Kedah, Perlis, Kelantan, Perak, Selangor, Johor, Pulau Pinang, Singapura. Kemudian, sejak perjanjian Inggris-Siam pada tahun 1906, Thailand secara resmi menguasai negara-negara di Melayu Utara dan Malaysia menguasai Melayu Selatan.

Sejak penyatuan negara di wilayah Melayu Utara menjadi bagian dari Thailand, terjadilah benturan budaya antara Muslim Melayu dan Thailand. Pada masa pemerintahan yang dikuasai oleh Perdana Menteri Jendral P. Pibhulsongkram, Marshal Sarit, dan para Jendral lainnya, kebijakan nasionalisme Thailand menjadi kebijakan utama yaitu upaya penggunaan budaya dan bahasa Thai untuk seluruh wilayah Thailand, hal ini membuat benturan budaya yang menimbulkan keinginan kuat untuk melawan bagi rakyat Muslim Patani. Upaya modernisasi untuk menyatukan negara yang telah dimulai di bawah Kerajaan Siam yang terdahulu kehilangan momentumnya. Thailand kembali terancam disintergrasi akibat adanya konflik-konflik kekuasaan dan persaingan etnis. Selain itu, pemerintah

mengupayakan asimilasi kebudayaan sehingga kebudayaan melayu Patani menjadi berkurang.

Secara linguistik, bahasa yang digunakan oleh rakyat di Thailand Selatan adalah bahasa Melayu. Hanya sedikit di antara mereka yang menggunakan bahasa Thailand. Jarang ditemui rakyat yang menggunakan bahasa Thailand untuk bahasa sehari-hari meskipun fasih berbahasa Thailand. Bagi Muslim Patani bahasa Melayu memiliki implikasi kultural yang signifikan karena bahasa mencerminkan identitas. Bagi mereka, bahasa merupakan pengikat dan perekat bagi orang Melayu. Bahasa asal menciptakan kesadaran yang mampu mengikat manusia untuk menjadi lebih dekat dengan tanah leluhur dan mempertahankan loyalitas kepada tanah leluhurnya tersebut. Bagi rakyat Thailand Selatan, bahasa Melayu adalah bahasa Islam juga, kehilangan bahasa berarti kehilangan identitas dan sejarah budaya.

Beberapa kelompok menjadikan bahasa dan agama sebagai simbol kesadaran kolektif dan pada tahap tertentu merupakan dasar kedaulatan sebuah bangsa. Bahasa sebagai simbol nasionalisme dan sering digunakan sebagai satu ikatan yang membangun rasa nasionalisme yang memiliki peran besar dalam pembentukan gerakan sosial politik dan menyediakan tempat bagi tumbuhnya ideologi sebuah bangsa. Hal ini bisa dilihat dalam kasus pemberotakan etnis Muslim Patani di Thailand Selatan. Bahasa dan agama menjadi simbol identitas yang menandai politik perbedaan antara identitas Melayu Thailand Selatan dengan penduduk Thailand yang lain. Identitas Melayu sengaja dipertahankan untuk penanda bagi identifikasi *outer* dan *inner group*. Dalam konflik etnis Muslim Patani di Thailand Selatan, identitas Melayu tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Agama bukan hanya sekedar menjadi sistem kepercayaan namun sekaligus menjadi identitas kelompok dan menjadi sadar bagi kesadaran kolektif. Ditinjau dari aspek primordialisme, bahasa dan agama menempati posisi penting dan menentukan keberhasilan perjuangan pemisahan diri dan iredentisme Thailand Selatan (Wardhani, 2012).

Perbedaan etnis Thailand dengan Melayu juga berdampak pada keterbelakangan ekonomi di Thailand Selatan.

Kesenjangan ekonomi tersebut disebabkan oleh pemerintah Thailand dianggap kurang memberi perhatian pada kesejahteraan rakyat setempat. Situasi ekonomi bisa jadi merupakan fakta dan sekaligus persepsi Muslim Patani pada sikap Pemerintah Thailand. Secara faktual, kemakmuran Muslim Patani lebih rendah dibanding dengan wilayah lain di Thailand. Program pembangunan yang tidak cukup dilakukan di wilayah selatan juga menyebabkan masalah yang lebih besar antara dua etnis yang berbeda. Selain itu proyek-proyek pemerintah yang tidak dilakukan di wilayah selatan dianggap sebagai kurangnya perhatian bagi mereka. Secara persepsional, pemerintah Thailand dapat dianggap diskriminatif. Jika pemerintah membangun proyek di Thailand Selatan, menurut perspektif kaum Muslim Patani, pemerintah Thailand melakukan invasi teritorial atas wilayah mereka. Oleh karena itu wajar bila Muslim Patani mengorganisasi diri untuk melakukan pemberontakan.

Seiring berjalannya waktu dan karena berbagai upaya yang telah dilakukan, baik pemerintah pusat maupun gerakan separatis di Selatan telah mengalami transformasi. Masa-masa yang sebelumnya tuntutan masyarakat Muslim Patani kepada Pemerintah Thailand hanya sebatas pada otonomi dalam urusan keagamaan, budaya, dan hukum mulai berubah yaitu menjadi pemerintahan yang otonom. Dalam memperjuangkan cita-cita ini, ternyata di kalangan Muslim Patani terdapat perbedaan dalam orientasi ideologi, taktik, dan ruang lingkup operasi perjuangan. Perbedaan inilah yang menyebabkan gerakan separatis terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yang masing-masing memiliki struktur kepemimpinan dan keanggotaan dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, organisasi-organisasi separatis ini menuntut kemerdekaan penuh bagi Patani (Supriadi, 2008). Gerakan tersebut antara lain Barisan Nasional Pembebasan Patani, Barisan Revolusi Nasional, dan *Pattani United Liberation Organization*. Pemberontakan untuk pemisahan ini dilaksanakan karena Muslim Patani merasa bumi mereka dijajah, identitas mereka di asimilasi dan hasil bumi mereka dikuasai oleh kerjaan Thailans. Ancaman yang paling

serius terhadap pemerintah Thailand adalah gerakan-gerakan separatis di Patani, Narathiwat dan Yala.

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan pemerintah Thailand dalam dua belas tahun dengan terbentuknya komisi rekonsiliasi nasional yang mengantarkan dan memediasi perdamaian dan dengan kebijakan pendekatan undang-undang darurat yang mempunyai kewenangan bagi pemerintah Thailand mengarahkan kekuatan militer menangani konflik di Thailand Selatan. Kuatnya peran militer di Thailand, membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa di jalankan. Pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Muslim Patani. Persyaratan pemakaian ketat bahasa nasional Thailand dan sikap yang mencerminkan nasionalisme pro kebijakan pemerintah pusat Thailand menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komisi rekonsiliasi.

Berbagai upaya perdamaian yang telah ditawarkan belum membuahkan hasil yang signifikan. Terlebih pemerintah memberlakukan undang-undang darurat dimana memberikan kewenangan yang terlalu besar pada militer. Wewenang ini menjadikan militer angkuh dan ringan tangan sehingga mudah melepaskan peluru pada masyarakat Muslim Patani yang mengakibatkan jumlah korban dari adanya kebijakan ini meningkat, dan masyarakat Muslim Patani pun menjadi tak kalah brutal. Konflik ini menjadi semakin kompleks dengan melibatkan banyak sumber konflik politik, ekonomi, etnis, dan agama yang hingga kini belum menemukan titik terangnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat kita ketahui bahwa konflik antara Muslim Patani dengan pemerintah Thailand masih terus berlanjut, Muslim Patani masih menginginkan untuk memperjuangkan hak-haknya kembali. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti satu masalah yaitu:

Bagaimana strategi Pemerintah Thailand dalam mengintegrasikan masyarakat Patani secara damai?

C. Kerangka Pemikiran

Konsep Nation Building

Pembangunan nasional atau *Nation Building* merupakan sebuah proses atau cara untuk mengembangkan serta memperbaiki kemampuan sebuah negara untuk berfungsi secara utuh. Pada dasarnya setiap negara, berkembang maupun modern, tidak pernah berhenti dalam meningkatkan kemampuannya untuk berfungsi. Setiap negara akan terus berproses dan berubah serta beradaptasi dengan waktu dan keadaan baik itu domestik maupun internasional (Fisip, 2021). *Nation building* merupakan poses menyusun identitas nasional menggunakan kekuatan negara. *Nation building* bertujuan untuk menyatukan masyarakat di dalam negara sehingga tetap stabil secara politik. Dalam beberapa pendapat mengatakan kesuksesan sebuah *nation building* terlihat jika tingkat kekerasan menurun dan tingkat ketertiban dan penegakan hukum meningkat.

Secara internal proses *nation building* dapat dilakukan dengan pembangunan atau peningkatan fungsi keamanan, kesejahteraan, dan legitimasi atau penegakan hukum dari negara tersebut. terdapat berbagai komponen yang ada dalam *nation building* untuk mencapai peningkatan fungsi negara tersebut, antara lain rekonstruksi kesehatan publik, ekonomi, control terhadap perbatasan, dan beberapa elemen keamanan dalam negeri yang harus menjadi objek atau pertimbangan yang penting bagi para pembuat keputusan. Beberapa negara bahkan melakukan proses *nation building* dengan pemaksaan atau kekerasan. Tetapi itu semua dilakukan untuk mendapatkan bentuk legitimasi sebagai sesuatu yang penting dalam *nation building*. Dalam penelitian ini terlihat bahwa adanya permasalahan etnis antara Muslim Patani dengan pemerintah Thailand menghambat tujuan *nation building* negara Thailand,

karena dengan adanya pemberontakan yang dilakukan Muslim Patani di Thailand Selatan membuat integrasi di Thailand tidak stabil yang mana tidak sesuai dengan tujuan *nation building* yaitu menyatukan masyarakat agar mencapai keselarasan antar masyarakat maupun negara.

Akulturas

Untuk mengupayakan *nation building* di Thailand Selatan atas masalah etnis yang terjadi antara pemerintah Thailand dan Muslim Patani, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan akulturasi untuk mengintegrasikan rakyatnya khususnya di Thailand Selatan yaitu etnis Muslim patani. Akulturasi menurut Berry suatu proses dimana individu atau kelompok mengadopsi budaya baru dengan mengadopsi nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan. Akulturasi suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi disaat orang yang berasal dari suatu budaya masuk ke dalam budaya yang berbeda. Akulturasi tidak hanya memengaruhi satu pihak saja, namun juga proses interaktif antara sebuah kebudayaan dan kelompok tertentu. Syarat terjadinya akulturasi yaitu harus adanya kontak diantara dua anggota yaitu budaya tuan rumah dan pendatang. Berry meunjukkan level akulturasi setiap individu tergantung pada dua proses independen. Yang pertama adalah derajat di mana individu berinteraksi dengan budaya tuan rumah, mendekati atau menghindar (*out group contact and relation*). Dan yang kedua adalah derajat di mana individu mempertahankan atau melepaskan atribut budaya pribuminya (*ingroup identity and maintenance*)(Utami, 2015).

Adapun menurut Rangkuti dan Hasibuan, akulturasi merupakan suatu konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan penerima tersebut. Akulturasi di masyarakat terbentuk melalui kontak budaya yang satu dengan yang lainnya(Wardana, 2017). Kontak budaya tersebut dapat terjadi antara orang yang bersahabat maupun bermusuhan. Hal

itu dikarenakan karena adanya unsur perbedaan sehingga menyebabkan adanya akulturasi dari kedua perbedaan tersebut. Kontak budaya juga dapat terjadi apabila ada seorang penguasa dengan yang dia kuasai berinteraksi sehingga menyebabkan adanya hubungan baru dan memunculkan percampuran dua budaya yang baru (Firdaningsih, 2019).

Bentuk akulturasi berupa dikeluarkannya kebijakan khusus pada tahun 1921 bagi lembaga pendidikan, yaitu mewajibkan pengajaran bahasa Thai dan ajaran agama Buddha. Pemerintah juga mempromosikan buku-buku dan materi pelajaran yang membuat siswa mencintai Thailand, hidup dengan budaya Thailand, memberi produk-produk Thailand, dan berbicara dalam bahasa Thailand (Sodiqin, Budaya Muslim Patani (Integrasi, Konflik, dan Dinamika), 2016). Selain lembaga pendidikan, sampai saat ini pemerintah Thailand juga mewajibkan kantor, pemerintah, dan media untuk menggunakan bahasa Thai. Strategi tersebut ternyata memang membuahkan hasil bagi pemerintah Thailand. Dalam waktu sekitar 50 tahun, banyak generasi muda Melayu lebih suka berbahasa Thai dibandingkan bahasa Melayu, baik di sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi, mereka tetap menggunakan bahasa Melayu ketika berada di lingkungan keluarga. Sebelumnya pemerintah Thailand menggunakan kebijakan asimilasi yang mana akan menghilangkan total identitas Muslim Patani. Tetapi kebijakan ini gagal karena mendapat pemberontakan dari Muslim Patani, mereka merasa identitasnya terancam. Demikian dengan adanya akulturasi ini diharapkan dapat menggeser budaya Muslim Patani yang tidak sesuai dengan budaya Thailand dan Muslim Patani mulai mau mengadopsi aturan pemerintah pusat tanpa menghilangkan identitas dan hak-haknya. Sehingga integrasi dapat tercapai antara pemerintah Thailand dengan Muslim Patani.

Dapat disimpulkan bahwa untuk membantu upaya *nation building* tersebut, disini penulis menggunakan konsep akulturasi sebagai penguat, dimana akulturasi merupakan proses suatu kelompok masyarakat dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing. Secara perlahan, budaya asing tersebut akan diterima oleh kelompok masyarakat tersebut tanpa

menghilangkan budaya khas masyarakat itu. Pada penelitian ini, Thailand sebagai negara penerima masuknya etnis minoritas Muslim Patani dapat mengeluarkan kebijakan dimana seluruh penduduk Thailand termasuk Muslim Patani untuk mengikuti aturan-aturan pemerintah pusat seperti setiap penduduk harus berbahasa Thailand dan mempunyai nama Thai untuk mencapai intergrasi yang diinginkan oleh Thailand. Namun juga, pemerintah pusat diharapkan tetap memberikan hak-hak yang diinginkan oleh Muslim Patani untuk tetap menjaga identitasnya sebagai etnis Melayu.

D. Hipotesa

Strategi mengintegrasikan Muslim Patani yang dilakukan oleh pemerintah Thailand yaitu dengan melakukan integrasi budaya dengan akulturasi. Pemerintah Thailand mengambil keputusan yakni seluruh warga negara tetap mengikuti aturan pusat, namun tidak melupakan hak dan identitasnya sebagai muslim Patani. Dalam perwujudannya, Muslim Patani tetap diperbolehkan untuk mendirikan pendidikan yang berbasis Islam dan banyak tokoh Islam yang memiliki jabatan penting dalam kerajaan. Di samping itu, pemerintah Thailand juga dibantu oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam memecahkan masalah muslim di Patani dan sekitarnya demi tercapainya kualitas hidup Muslim Melayu di Thailand. Dalam kasus ini, OKI memilih untuk menyelesaikan melalui negosiasi dengan meminta kepada pemerintah Thailand untuk mengizinkan masyarakat Muslim Patani dan sekitarnya untuk tetap mengembangkan budaya dan bahasanya.

E. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Thailand dalam mencapai Perdamaian dengan Minoritas Muslim Pattani, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

Mengetahui bagaimana strategi yang dibuat oleh Pemerintah Thailand untuk mencapai perdamaian dengan Muslim Patani.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Sebagai usaha agar penelitian tetap fokus terhadap tema yang telah ditentukan, maka diperlukan pembatasan masalah. Fokus objek penelitian ini dimulai dari konflik fase II yang dimulai pada tahun 2001 saat pemerintah Thailand memberi subsidi dengan harapan mengurangi pemberontakan sampai fase III tahun 2011 dimana mulai munculnya kelompok-kelompok pemberontak berideologi Islam.

G. Metode Penelitian

Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memeliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti (Sugianto, 2020).

Selain menggunakan metode deskriptif, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data *library research*, yaitu teknik kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara

membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka kerangka pemikiran (Kartono, 1998). Kemudian selain menggunakan bahan bacaan atau buku-buku, teknik pengumpulan data *library research* memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari beberapa literatur yang lain seperti artikel, jurnal, berita dan bahan bacaan lainnya di media cetak, media elektronik, serta sumber dari *website*. Sehingga metode penelitian ini berusaha memberikan deskripsi tentang bagaimana strategi Pemerintah Thailand dalam mencapai perdamaian dengan Muslim Patani.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini berisi pembahasan mengenai bagaimana jalannya integrasi di Thailand, problematika integrasi Patani di Thailand, serta konflik yang terjadi antara Muslim Patani dengan pemerintah Thailand.

BAB III, pada bab ini menjelaskan bagaimana penyatuan budaya dalam membantu strategi pemerintah Thailand dalam mengintegrasikan Muslim Patani.

BAB IV, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data dan pembahasan penelitian.